



Suluh Dipanegara
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Pembelajaran Demokrasi Bagi Generasi Muda Menjelang Pemilu 2024

Thomas Santoso

Universitas Kristen Petra

*Corresponding author: thomass@petra.ac.id

SULUH DIPANEGARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat

vol 1 no 1 (Mei 2024)

ISSN: 3047-7506

Abstract

Democracy means sovereignty in the hands of the people, and choosing leaders through general elections. The 2024 election is the biggest, most complicated and most complex electoral agenda.

The young generation, which makes up 60% of citizens who have the right to vote, is an important community that determines election results. Through democratic learning, it is hoped that the younger generation will become intelligent voters, play a role in monitoring, and if possible become candidates in elections.

Keywords: Democracy, General Elections, Young Generation.

Abstrak

Demokrasi maknanya kedaulatan di tangan rakyat, dan memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Pemilu 2024 menjadi agenda elektoral paling besar, paling rumit, dan paling kompleks.

Generasi muda, yang jumlahnya mencapai 60% dan warga negara yang memiliki hak pilih, merupakan komunitas penting yang menentukan hasil pemilu. Melalui pembelajaran demokrasi diharapkan generasi muda menjadi pemilih yang cerdas, berperan dalam pengawasan, dan apabila mungkin menjadi kandidat dalam pemilu.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Generasi Muda.

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem politik demokrasi. Dalam negara demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintahan, yang dibentuk lewat pemilihan umum (pemilu), berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang punya kapasitas, bisa dipercaya, dapat bekerja



Suluh Dipanegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

keras – cerdas – ikhlas, dan berintegritas. Pemilu memberlakukan kesamaan kedudukan dalam hukum, yaitu satu orang satu suara.

Sejak Indonesia merdeka telah diselenggarakan 12X pemilu. Pemilu 2024, yang berpatokan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017, memilih lima jabatan politik: Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. Pemilu 2024 merupakan agenda electoral paling besar, paling rumit, dan paling kompleks. Ada 204,8 juta penduduk yang berhak memilih, sebagian besar adalah generasi muda. Generasi muda yang memiliki hak pilih mencapai 60%, meliputi generasi milenial dan generasi Z.

Generasi muda sebagai kader bangsa, juga menentukan arah perkembangan NKRI lewat pemilu. Oleh karena itu, generasi muda perlu diberi informasi yang benar agar aktif berperan sebagai pemilih, pengawas, dan bahkan (apabila mungkin) kandidat/ calon pemimpin. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan tingkat partisipasi sosial generasi muda dapat ditingkatkan, dan sekaligus sebagai pengabdian masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.

Pembelajaran atau sosialisasi (Pujianto dkk) merupakan cara yang efektif dan efisien untuk memberdayakan masyarakat. Penelitian dan pengabdian masyarakat bertalian dengan Pemilu 2024 telah dilakukan oleh Iswardhana dkk (2023), Yusrin dkk (2023), dan Yuniarti dkk (2022).

2. Metode

Metode yang digunakan tergolong penelitian tindakan (*action research*) (Santoso, 2022; Cresswell, 2018) karena proses penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan persepsi generasi muda tentang pemilu, dan secara bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan peran serta generasi muda dalam pemilu. Penelitian dilakukan di kalangan generasi muda (mahasiswa) di Universitas Kristen Petra Surabaya. Penelitian dilakukan dalam empat kali pertemuan. Pada pertemuan pertama 16 Oktober 2023 hadir 69 orang.

Setelah diberi penjelasan tentang pemilu 2024, ada 52 orang menyatakan akan berperan serta sebagai pemilih, dan 17 orang tidak akan memilih atau masih ragu-ragu dan belum menentukan sikap. Pertemuan kedua 19 Oktober 2023, dilaksanakan sosialisasi khusus untuk 17 orang yang rencana tidak akan memilih, materi sosialisasi tentang tanggung jawab warga negara dan manfaat peran serta dalam pemilu. Pertemuan ketiga 6 November 2023 diikuti 69 orang dengan materi sosialisasi bagaimana memilih dengan baik dan kriteria untuk menentukan pilihan. Pertemuan keempat 9 November 2023 diikuti 69 orang dengan materi sosialisasi tantangan-tantangan dan ukuran sukses pemilu kemudian dilanjutkan dengan angket untuk melihat perubahan setelah sosialisasi pemilu.



Gambar 1. Pembelajaran Demokrasi Menjelang Pemilu 2024

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil angket dalam pertemuan pertama menunjukkan:

Tabel 1. Partisipasi dalam Pemilu 2024

Partisipasi	Frekwensi	Prosentase
Ikut	52	75,3%
Tidak ikut	12	17,4%
Ragu-ragu	5	7,3%
Total	69	100%

Dari 52 orang yang akan partisipasi dalam pemilu ditanyakan kriteria untuk menentukan calon yang akan dipilih. Hasilnya bisa dilihat di Tabel 2.



Sulu Dipanegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Tabel 2. Kriteria Pilihan

Kriteria	Frekwensi	Prosentase
Program	9	17,3%
Identitas	38	73.0%
Progran dan Identitas	5	9,7%
Total	52	100%

Setelah dilakukan pembelajaran demokrasi tentang seluk-beluk pemilu 2024, dilakukan angket untuk mengukur perubahan yang terjadi setelah proses pembelajaran demokrasi. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Partisipasi dalam Pemilu 2024

Partisipasi Pemilu	Sebelum Pembelajaran Demokrasi	Setelah Pembelajaran Demokrasi
Ikut	52 (73,3%)	67 (97,1%)
Tidak ikut	12 (17,4%)	-
Ragu-ragu	5 (7,3%)	2 (2,9%)
Total	69 (100%)	69 (100%)

Setelah pembelajaran demokrasi ada 67 orang yang akan ikut pemilu 2024. Tabel 4 menunjukkan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan calon yang akan dipilih, sebelum dan sesudah pembelajaran demokrasi.

Tabel 4. Kriteria Pilihan

Kriteria Pilihan	Sebelum Pembelajaran Demokrasi	Setelah Pembelajaran Demokrasi
Program	9 (17,3%)	34 (50,8%)
Identitas	38 (73%)	22 (32,8%)
Progran dan Identitas	5 (9,7%)	11 (16,4%)
Total	52 (100%)	67 (100%)

Setelah pembelajaran demokrasi ternyata ada perubahan keikutsertaan dalam pemilu dari 52 orang menjadi 67 orang, artinya ada peningkatan 28,8%. Kriteria pilihan berdasar program juga ada perubahan dari 9 orang menjadi 34 orang, artinya ada peningkatan 277,7%.



Suluh Dipanegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Pembelajaran Demokrasi Menjelang Pemilu 2024

Demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut. Indonesia pernah menganut demokrasi konstitusional/ parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi presidensial (1965-1998), dan pada masa reformasi (1998-sekarang) demokrasi Pancasila berdasar UUD 1945 yang telah diamandemen.

Demokrasi Pancasila masih mengalami kendala, karena pada prakteknya lembaga perwakilan dan partai politik masih belum baik, partisipasi politik rakyat juga belum tinggi, dan munculnya penguasa baru dalam demokrasi. Apabila tidak hati-hati, demokrasi saat ini dapat membuang kedaulatan rakyat. Penyebabnya tingkat pendidikan yang relatif rendah, status sosial-ekonomi terbatas, dan partisipasi politik yang cenderung menurun. Padahal demokrasi penting sebagai bentuk partisipasi dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, dan distribusi pendapatan secara adil.

Rabuska dan Shepsle dalam penelitiannya tentang politik di negara merdeka yang memiliki masyarakat majemuk menunjukkan bahwa pada awal kemerdekaan biasanya proklamator akan ditunjuk menjadi pemimpin (presiden dan wakil presiden). Setelah itu akan dilakukan pemilu, dan lazimnya partai politik yang didirikan oleh proklamator akan memenangkan pemilu. Namun pada periode berikutnya akan muncul partai primordial (etnis, suku, agama) yang akan memperoleh kursi di lembaga legislatif lokal, namun mungkin tidak dapat kursi di lembaga legislatif nasional. Berikutnya muncul ancaman konflik antar penduduk asli dan para pendatang. Apabila konflik ini tumpang tindih dengan terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, maka ancaman disintegrasi negara/ bangsa tidak terhindarkan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban warga negara untuk menjaga keberlanjutan negara.

Politik pada dasarnya baik, karena bertujuan untuk menciptakan kebaikan bersama (*bonum commune*). Politik pada dasarnya mengandung banyak nilai luhur, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, dan kepercayaan. Oleh karena itu jabatan politik harus diemban oleh orang yang memiliki kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan), integritas, dan berdedikasi tinggi untuk mengemban jabatan itu.



Suluh Dipanegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Kita tidak boleh alergi dengan politik, karena apabila kita menjauhi politik maka politik akan menghampiri kita. Biaya hidup, harga beras, harga BBM, harga tepung, dst tergantung pada keputusan politik. Orang yang alergi politik tidak sadar bahwa tidak ikut dalam pemilu akan melahirkan pemimpin yang membiarkan anak terlantar, kriminalitas meningkat, KKN menjamur, dan perilaku negatif lainnya.

Pemilih yang baik harus memperhatikan hal berikut ini:

- a. Memiliki informasi tentang partai politik dan calon yang akan dipilih. Kita bisa *browsing* di laman KPU untuk mendapatkan informasi tentang nama, nomor urut, sejarah/ riwayat hidup, program dan rekam jejak dari partai politik dan calon yang akan dipilih.
- b. Memilih berdasarkan hati nurani
- c. Menolak politik uang dan janji yang tidak logis
- d. Hati-hati dengan hoaks. Media sosial belum tentu valid. Sebaiknya ikuti informasi dari KPU dan atau media *mainstream*

Kriteria yang dapat digunakan untuk calon yang akan dipilih antara lain integritas (ucapan dan rekam jejak), nasionalis, tidak melanggar HAM, tidak KKN, tidak terlibat kriminal dan perbuatan tercela lainnya.

Pemilu yang jujur dan adil seharusnya merupakan sarana demokratis untuk melakukan perubahan politik (kekuasaan) tanpa kekerasan. Apabila dalam Pemilu terjadi kekerasan, maka hal itu merupakan salah satu indikator “ada apa-apa” dengan Pemilu. Kekerasan dalam Pemilu bisa muncul sebagai upaya masyarakat untuk membangun akses terhadap negara, sebagai produk dari reproduksi kekerasan negara yang eksesif, dan belum adanya mekanisme penyelesaian konflik antar elit.

Masyarakat butuh akses untuk mempengaruhi kebijakan negara, karena nasibnya ditentukan negara. Seandainya akses konstitusional, legal, institusional dan terbuka tersedia, maka masyarakat akan menempuh mekanisme tersebut. Namun sistem politik Indonesia tidak seperti itu. Akses konstitusional, legal, institusional dan terbuka nyaris tidak ada, oleh



Sulu Dipanegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

karena itu masyarakat berupaya cari akses tersebut walaupun inkonstitusional, ilegal, sporadik dan tertutup. Reformasi yang digulirkan mahasiswa ternyata hanya mengubah mekanisme yang tertutup—*hidden transcripts*—menjadi terbuka, tetapi tetap sulit memproses lewat jalur konstitusional, legal, dan institusional. Jadi kekerasan bukan berakar dari massa saja atau negara saja, tetapi ada proses dialogis antara negara dan massa.

Negara adalah satu-satunya institusi yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan lewat aparatus negara, seperti militer, polisi, dan peradilan. Kekerasan dilegitimasi negara untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti dinyatakan Arendt, kekerasan akan muncul bilamana kekuasaan sedang ada dalam bahaya, yang berarti bahwa meskipun kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan, namun kekerasan tidak mampu menciptakan kekuasaan. Pada awalnya kekerasan tersebut langsung dilakukan oleh negara. Namun dengan merebaknya isu hak asasi manusia, maka negara (rezim) tidak cukup menggunakan aparatus negara sebagai pemaksa, tetapi juga melibatkan masyarakat. Benih kekerasan telah merebak di masyarakat lewat pengorganisasian kriminal, bukan organisasi kriminal. Negara telah menggerakkan masyarakat untuk melakukan kekerasan.

Sistem politik demokrasi mengenal mekanisme penyelesaian konflik yang jelas lewat dukungan suara. Di Indonesia, mekanisme tersebut digunakan pada saat pemilihan umum. Namun sampai saat ini di Indonesia belum ada pelembagaan politik yang mampu mengelola konflik antar elit dan belum ada kriteria yang jelas tentang konflik elit. Salah satu akibat dari konflik antar elit adalah merebaknya kekerasan. Kekerasan akan semakin intens dan sulit dikelola apabila pihak yang terlibat konflik mempolitisir ideologi dan atau agama.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemilu 2024 ialah kampanye negatif (hoaks), isu SARA (Politisasi agama dst), politik uang, kepentingan pribadi/ keluarga/ kelompok, dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu.

Ukuran sukses pemilu dapat dilihat dari:

- a. Partisipasi masyarakat tinggi, agar keberagaman representatif, legal dan *legitimate*
- b. Kualitas untuk menentukan pilihan pemimpin lebih mengedepankan program daripada identitas pribadi



Suluh Dipanegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengamatan pemilu.

Dari data dan uraian di atas menunjukkan bahwa generasi muda perlu diberi pembelajaran demokrasi agar peran serta mereka dalam Pemilu 2024 bisa ditingkatkan. Tugas pembelajaran demokrasi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), tetapi juga menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa.

4. Kesimpulan

Salah satu ukuran sukses pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi generasi muda, yang jumlahnya 60% dari WNI yang mewakili hak pilih, perlu mendapat perhatian serius. Pembelajaran demokrasi pada generasi muda dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam Pemilu 2024. Generasi muda diharapkan berperan aktif sebagai pemilih, pengawas, dan bahkan (apabila mungkin) jadi kandidat pemimpin.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan kepada Departemen Matakuliah Umum Universitas Kristen Petra dan para mahasiswa dari Prodi Sastra Inggris, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Industri, Desain Komunikasi Visual, Desain Fashion, Ilmu Komunikasi, dan Manajemen Bisnis.

6. Daftar Pustaka

- Creswell, John W., & Creswell, J. David, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Los Angeles, Sage, 2018.
- Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Dizmond, Larry, *Developing Democracy*, Yogyakarta, IRE Press, 2003.
- Emmerson, Donald K., *Indonesia Beyond Soeharto*, Jakarta, Gramedia, 2001.
- Iswardhana, M. Ridha, dkk, "Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z di SMAN 4 Yogyakarta", JAMMU, Vol. 2, No. 1, 2023.



Suluh Dipanegara
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

- Pujianto, Wahyu Eko, dkk, “*Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Busa Online Pada Pengepul Sampah di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*”, MAFASA, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Rabuska, Alvin and Shepsle, Kenneth A., *Politics in Plural Societies. A Theory of Democratic Instability*, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company.
- Revitch, Diane & Thernstrom, Abigail (ed), *Demokrasi Klasik & Modern*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Santoso, Thomas, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Saga, 2022.
- Santoso, Thomas, *Pasang Surut Nasionalisme*, Surabaya, Saga, 2021.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1992.
- Tornquist, Olle, *Politics and Development*, London, Sage Publications, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*
- Yuniarti, Ratna, dkk, “*Analisis Deskriptif Minat Generasi Milenial Pada Pemilu 2024*”, Jurnal Mentari Publika, Volume 02, No. 02, 2022.
- Yusrin, dkk, “*Partisipasi Generasi Milenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024*”, Journal on Education, Volume 05, No. 03, Maret-April 2023.
- Zuhro, R. Siti, dkk, *Demokrasi Lokal*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2009.